

Police Brief

LANGKAH PENYIAPAN DELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG (SRG)

Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021



ANDI ARWIN SETIAWAN S.T., M.Si.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Wajo

Strategis dalam pengembangan dan percepatan implementasi SRG di daerah-daerah yang mencakup:



Tujuan SRG ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani/ kelompok tani, koperasi, UKM serta pelaku lainnya (eksportir, prosesor, pedagang, lembaga perbankan/keuangan non-bank, jasa pergudangan, dll) di daerah pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan ketahanan pangan wilayah.

a. Pembinaan dan Fasilitasi

Melakukan sosialisasi SRG pada tingkat kabupaten, kelompok tani dan asosiasi, serta memberikan pelatihan, bimbingan teknis serta monitoring di lapangan, juga memberikan dukungan penyediaan sarana dan peralatan, yakni gudang, alat pengering, alat sortasi dan lain-lain. Mengingat sebenarnya sumber daya dan dana untuk mendukung keberhasilan implementasi SRG tersebar di berbagai instansi/lembaga pemerintah dan swasta di daerah, maka diperlukan sinergi bersama antara dinas di daerah (sektor perdagangan, industri pertanian, koperasi, dan UKM, perikanan, perkebunan) serta sektor swasta/asosiasi (termasuk BUMD dan perbankan) dari mulai pra panen, masa panen dan pasca panen. Tidak kalah penting pula adalah upaya bersama dalam pengembangan komoditas unggulan daerah (kualitas dan kuantitas).

b. Penguatan pelaku ekonomi usaha kerakyatan

Pemda juga diharapkan bisa meningkatkan kehandalan kelompok tani/ Produsen dan pelaku usaha, mendorong lembaga keuangan setempat (bank maupun non-bank) untuk memfasilitasi petani/kelompok tani, koperasi dan UKM serta melakukan kerjasama intensif dengan pemangku kepentingan SRG di daerah yakni BUMN/BUMD, kadinda, asosiasi, sektor swasta, instansi terkait.

c. Pemantauan dan Koordinasi

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Peran Pemda juga sangat vital dalam pemantauan dan pengkoordinasian aktivitas SRG. Pemda diharapkan membuat kebijakan daerah untuk mempercepat perkembangan SRG seperti penguatan kelembagaan, peraturan yang mendorong para pihak mendukung SRG dan kebijakan yang memfasilitasi dan mengefisienkan biaya SRG, peningkatan mutu dan produktivitas. Di samping itu memantau hambatan dan kendala di lapangan, Memonitor perkembangan penanganan kasus yang terjadi, Memfasilitasi pengembangan pasar lelang setempat, Mengelola data dan informasi kondisi daerah: gudang, pelaku usaha (eksportir, pedagang), kelompok tani/gapoktan, perbankan, produk pertanian unggulan, dan lain-lain. Koordinasi badan pengawas SRG dan pemerintah daerah ini sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali.

Langkah Prioritas Pemda dalam penyiapan pelaksanaan SRG di lapangan



1. Identifikasi Potensi Komoditi Daerah

Bappelitbangda kab. wajo telah melakukan kajian tentang jumlah produksi, dan menyatakan bahwa komoditi gabah/ beras dan komoditi jagung layak untuk diresigudangkan sesuai dengan perhitungan LQ tahun 2016-2019 untuk sektor unggulan kab. Wajo Tahun 2021.



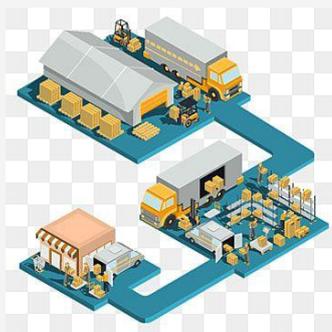
2. Kesiapan Pelaku Usaha

Mendata para pelaku usaha di daerah tersebut baik petani, kelompok tani, maupun pelaku usaha lainnya (prosesor, pedagang, eksportir) yang dapat dipersiapkan untuk berperan serta dalam SRG dan membina mereka dengan sosialisasi dan bimbingan teknis ataupun pendampingan.



3. Kesiapan Gudang dan Sarana Pendukung

Melakukan identifikasi jumlah gudang yang ada atau lokasinya apakah di sentra produksi serta apakah gudang tersebut memenuhi syarat standar gudang yang berkualitas baik (SNI). Dan menghubungi LPK untuk inspeksi gudang (yang telah mendapatkan persetujuan guna melihat kondisi kesiapan infrastruktur gudang dan pemberian rekomendasi dalam rangka sertifikasi gudang. Keberadaan sarana pendukung utama seperti dryer pada komoditas Gabah sangat penting, karena alat tersebut untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan daya tahan komoditi yang disimpan di gudang.



4. Pengelola Gudang

Pemda menghubungi Pengelola Gudang SRG yang sudah mendapat persetujuan Bappebti dalam rangka menjajaki kesiapan mereka untuk dapat beroperasi di wilayah tersebut. Jika terdapat calon pengelola gudang namun belum mempunyai persetujuan dari Bappebti, maka mereka dapat dibantu untuk mendaftarkan ke Bappebti sesuai dengan prosedur dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan Kepala Bappebti.

Langkah Prioritas Pemda dalam penyiapan pelaksanaan SRG di lapangan



5. Lembaga Penilaian Kesesuaian / LPK (uji mutu komoditi)

Pemda menghubungi LPK setempat yang berwenang untuk melakukan uji mutu komoditas guna membahas penyiapan kualitas mutu komoditi dan produsen setempat dan penanganan pasca panennya serta untuk mengetahui secara rinci prosedur uji mutu komoditi untuk SRG di daerah tersebut.



6. Lembaga Pembiayaan (Perbankan / Lembaga Keuangan Non-Bank)

Pemda melakukan pertemuan dengan para pihak yang telah mempunyai petunjuk teknis pembiayaan kredit untuk skema SRG guna memperoleh masukan kesiapan mereka dalam skema SRG, prosedur pencairan kredit yang cepat serta tingkat bunga yang kompetitif.



7. Lembaga Asuransi

Sesuai peraturan SRG maka pihak pengelola gudang wajib mengasuransikan barang yang dikelolanya, untuk itu maka pihak pemda dapat bekerjasama dengan pengelola gudang atau pihak perbankan yang ada untuk mengidentifikasi pihak asuransi di daerah tersebut yang mempunyai kredibilitas baik dengan biaya yang kompetitif.

8. Koordinasi dan Sinergi oleh Pemda/ Dinas dengan stakeholders SRG dan Bappebti

Jika identifikasi lapangan dan persiapan di atas (no 1 s/d 7) telah dilakukan maka Pemda (dikoordinasi oleh dinas yang menangani perdagangan) melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha (petani/kelompok tani, koperasi, UKM, prosesor, eksportir) serta lembaga dalam SRG yang telah siap (pengelola gudang, LPK, Pusat Registrasi) serta lembaga pembiayaan untuk membahas penjadwalan dan penyiapan operasional pelaksanaan SRG (mulai dari penyiapan komoditi saat panen, uji mutu, masuk gudang, penerbitan Resi Gudang, pengajuan kredit ke bank serta aspek pemasarannya).

